**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA
KEWARGANEGARAAN DAN AGAMA) HASIL DARI PERJANJIAN KAWIN KONTRAK
DI KABUPATEN JEPARA**

Oleh

Amelia Fidela Rahmadita, Indira Swasti Gama Bhakti, Wahyu Prabowo

Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar

e-mail : ameliafidela09@gmail.com, indiraswastigb@gmail.com, prabowowahyu87@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah keluarga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan campuran yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perkawinan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan dan salah satu pihaknya merupakan seorang warga negara Indonesia. Pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan atas dasar perjanjian kontrak mengenai kesepakatan bersama yang bertujuan mencari keuntungan para pihak yang melakukannya merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui keabsahan suatu perkawinan campuran yang dilakukan berdasar pada perjanjian kontrak dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul ketika perkawinan berakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang dicapai ialah bahwa perkawinan campuran yang dilakukan tanpa dihadapan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak terjadi. Hal tersebut berdampak pada hilangnya perlindungan berkaitan dengan akibat hukum yang timbul karena adanya suatu perkawinan bagi suami, istri maupun anak.

Kata Kunci : Perkawinan, Kawin Kontrak, Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian.

Abstract

Marriage is an inner and outer bond of a man and a woman in forming a family based on the divinity of the Almighty. Mixed marriages that are currently practiced by many Indonesian people are marriages by two people who are subject to different laws and one of the parties is an Indonesian citizen. The implementation of mixed marriages carried out on the basis of a contractual agreement regarding a collective agreement aimed at seeking the benefits of the parties who do it is a deviation from the Marriage Law. The purpose of this study is to determine the validity of a mixed marriage based on a contract agreement and to find out the legal consequences that will arise when the marriage ends. This study uses a qualitative approach with normative juridical research methods. The result of this research is that mixed marriages which are carried out without the presence of a marriage registrar have no legal force and are considered not to have occurred. This has an impact on the loss of protection related to legal consequences arising from a marriage for husband, wife and children.

Keywords: Marriage, Contract Marriage, Agreement, Legal Terms of Agreement.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga membutuhkan orang lain dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Hak dasar manusia pada saat ia lahir sampai meninggal dunia dinamakan hak asasi manusia. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu hal yang sangat penting dan dilindungi. Hak asasi manusia sebagai makhluk sosial diantaranya disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Berdasarkan hal tersebut negara telah memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk melakukan perkawinan dengan siapapun asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keberagaman masyarakat di Indonesia menyebabkan lahirnya berbagai macam peraturan khususnya dalam hal perkawinan, Indonesia menganut beberapa macam aturan diantaranya terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) bagi masyarakat muslim, serta hukum adat yang diyakini oleh masyarakat di daerah tertentu. Pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi :

“ikatan lahir batin antara seorang laki-laki maupun perempuan sebagai pasangan suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila calon suami maupun istri memenuhi persyaratan dan

tata cara pelaksanaan tidak dinyatakan sebagai seseorang yang dilarang kawin menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan terdapat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan diantaranya bahwa perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan serta dilakukan oleh seorang laki-laki berusia (enam belas) tahun dan perempuan yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Mengenai batas usia seseorang dalam melakukan perkawinan mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No 16 Tahun 2019). Pasal tersebut memberikan persamaan mengenai batas usia seorang laki-laki maupun perempuan dalam melakukan perkawinan ialah sama yakni 19 (sembilan belas) tahun, apabila terdapat penyimpangan mengenai batas usia tersebut maka dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh pihak yang bersangkutan.

Pelaksanaan perkawinan, dewasa ini serta merta tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan, hal tersebut dilatar belakangi oleh perkembangan globalisasi dan masyarakat menimbulkan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan serta aturan yang terdapat di Indonesia. Pengaruh adanya perkembangan masyarakat tersebut salah satunya dalam bidang keperdataan diantaranya pada perkawinan. Saat ini, perkawinan campuran merupakan salah satu perbuatan hukum yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Pengertian perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang berarti bahwa perkawinan dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum berlainan dan diantara para pihaknya merupakan Warga Negara Indonesia. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia akan tunduk pada UU Perkawinan, namun apabila dilakukan di luar wilayah Indonesia maka tunduk pada hukum dimana

perkawinan tersebut dilakukan. Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan atau perikatan yang lahir sebagai akibat dari suatu perjanjian atas kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan sebuah perkawinan dan hidup bahagia bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat sahnya pada Pasal 1320 KUHPerdara diantaranya ialah :

- (1) *Sepakat*
- (2) *Cakap*
- (3) *Klausula Halal, dan*
- (4) *Hal tertentu.*

Hal tersebut mencerminkan tujuan perkawinan yang sakral bahwa perkawinan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup pada tiap manusia. Namun pelaksanaan perkawinan tidak berjalan lurus sesuai dengan tujuan undang-undang dikarenakan masyarakat di beberapa daerah melakukan perkawinan hanya berdasar pada tujuan tertentu. Perkawinan kontrak merupakan hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang terbatas oleh waktu dan syarat tertentu serta dilakukan secara diam-diam tanpa petugas pencatat nikah.¹ Perkawinan kontrak dilakukan atas dasar perjanjian mengenai jangka waktu serta imbalan imbalan berupa keuntungan para pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka buat. Latar belakang adanya perkawinan kontrak terdiri dari berbagai faktor, salah satu faktor utama yang menjadi alasan seseorang melakukan perkawinan kontrak ialah faktor ekonomi dan kebutuhan biologis yang harus terpenuhi.

Akibat hukum timbul karena adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh

setiap manusia. Teori akibat hukum menurut Soeroso adalah :

Akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki. Tindakan tersebut dinamakan tindakan hukum, dengan kata kata lain akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa lahirnya, lenyapnya atau berubahnya suatu hubungan hukum antara subjek hukum.² Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap manusia akan menimbulkan akibat hukum, hal tersebut juga terjadi pada perkawinan. Akibat hukum pada suatu perkawinan dapat melahirkan adanya hak dan kewajiban bagi suami, istri maupun anak. Dalam hal suatu perkawinan campuran dilaksanakan dengan perjanjian kontrak, maka akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya peristiwa tersebut dapat bertambah berkaitan dengan status kewarganegaraan para pihaknya maupun keabsahan perkawinan tersebut.

Salah contoh kasus perkawinan kontrak terjadi di Daerah Jepara Jawa Tengah, hal tersebut dilakukan oleh perempuan pribumi dengan laki-laki berkewarganegaraan asing diantaranya ialah :

Perkawinan kontrak yang dilakukan oleh Ny. D dengan Tn. T seorang warga negara Jepang pada tahun 2017. Perkawinan kontrak tersebut dilakukan, karena Tn. T yang merupakan seorang pekerja yang tinggal di Indonesia dan membutuhkan seseorang yang dapat merawat serta membantu menyiapkan kebutuhan sehari-hari nya selama bekerja di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Tn. T kepada sopir pribadinya yang merupakan seorang warga asli Jepara yang bernama Tn. Y kemudian Tn. Y membantu Tn. T untuk mencari perempuan yang ingin ia jadikan sebagai istri kontrak. Ny. D bersedia untuk menjadi istri kontrak karena di

¹Muggiati, SH., MH., "Kedudukan Hukum Kawin Kontrak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Cisarua-Jawa Barat)", *Jurnal Constitutum*, 12 (1), 2012, hlm. 498.

² R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 295.

iming-imingi oleh imbalan yang akan ia berikan, Tn. T dan Ny. D hanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk mengenal satu sama lain kemudian setelah dirasa ada kecocokan, keduanya sepakat untuk melakukan perkawinan kontrak mereka sepakat untuk melakukan perkawinan kontrak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penyusunan karya tulis ini ialah

1. Bagaimana keabsahan hukum perkawinan campuran hasil dari perjanjian kawin kontrak ?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan kontrak ketika perjanjian perkawinan kontrak tersebut telah berakhir ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut yakni untuk mengetahui keabsahan perkawinan campuran hasil dari perjanjian kawin kontrak serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan kontrak ketika perjanjian perkawinan tersebut telah berakhir.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan tentang akibat hukum dalam sebuah perkawinan campuran yang dilakukan dengan perjanjian kontrak melalui bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa tulisan

hukum serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia (Ensiklopedia).

C. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis normatif dengan menerapkan hasil penelitian yang digunakan pada pengertian hukum, norma, serta teori maupun doktrin yang berkaitan. Data awal dalam memperoleh informasi pada penelitian ini ialah norma hukum yang dikorelasikan dengan fakta yang relevan guna memperoleh kesimpulan pada permasalahan yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perjanjian Perkawinan Tn. T dan Ny. D (Perjanjian Tertulis)

Perjanjian yang harus ditaati berdasarkan kesepakatan antara Tn. T dan Ny. D dalam perkawinan kontrak tersebut diantaranya ialah :

- a. Perkawinan kontrak dengan jangka waktu 1 tahun.
- b. Tn. T memberikan mahar senilai 30 juta rupiah kepada Ny. D secara sukarela serta uang 4 (empat) juta rupiah setiap bulannya ditambah bonus yang tidak tentu jumlahnya sesuai kemampuan Tn. T sebagai apresiasi kepada Ny. D atas pekerjaannya.
- c. Ny. D tinggal bersama Tn. T di Hotel Jepara Indah yang telah ia sewa selama 1 tahun.
- d. Ny. D tidak boleh bekerja dan hanya mengurus kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Tn. T seluruhnya.
- e. Ny. D tidak diijinkan pulang dan bertemu keluarganya di rumah.

- f. Apabila Ny. D hendak pergi harus diantar oleh supir pribadi yang telah dipilih oleh Tn. T.
- g. Dalam perjanjian tersebut Ny. D tidak boleh memiliki anak dari Tn. T.
- h. Apabila Ny. D meninggalkan Tn. T sebelum kontrak berakhir, maka dapat dituntut secara hukum pidana.

Perkawinan tersebut dilakukan di Indonesia pada tahun 2015 ketika Tn. T yang lahir pada tahun 1955 telah berusia 60 tahun sedangkan Ny. D lahir pada tahun 1980 telah berusia 35 tahun. Perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata yang terdiri dari syarat subjektif berupa kesepakatan antara kedua belah pihak serta kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perjanjian, sedangkan syarat objektif perjanjian diantaranya ialah klausa halal yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tertentu dalam sebuah perjanjian berarti suatu perjanjian memiliki ketentuan mengenai jenis dan dapat dihitung serta di tetapkan.

2. Perjanjian Perkawinan Tn. L dan Ny. E (Perjanjian Lisan)

Contoh kasus dari perkawinan ini ialah seorang WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA yang berasal dari Korea Selatan. Ny. E merupakan seorang janda yang berprofesi sebagai buruh di Perusahaan mebel milik Tn. L. Sedangkan Tn. L merupakan seorang WNA yang memiliki perusahaan Mebel tempat Ny. E bekerja. Perkawinan antara Tn. L dan

Ny. E dilakukan pada tahun 2017 di Jepara dan dilakukan ijab qabul dihadapan penghulu. Perkawinan Tn. L dan Ny. E dilakukan secara islam meskipun Tn. L merupakan seorang pemeluk agama kristen. Perkawinan tersebut berawal dari kebiasaan keduanya bertemu dalam lingkungan kerja, kemudian mereka sepakat melakukan perkawinan kontrak selama 2 (dua tahun). Perjanjian perkawinan antara Tn. L dan Ny. E tidak dituangkan secara tertulis, melainkan hanya sebatas kesepakatan lisan antara keduanya dalam menjalankan perkawinan kontrak tersebut. Menurut data dari narasumber, Ny. E diberikan uang bulanan oleh Tn. L sebesar 5 (lima) juta dalam sebulan. Setelah perkawinan tersebut, Ny. E mengikuti suaminya untuk tinggal di gudang mebel yang telah Tn. L sewa untuk menjalankan usahanya.

Perkawinan tersebut berjalan kurang lebih sesuai dengan perjanjian yang mereka buat, namun setelah itu usaha meubel yang dijalankan oleh Tn. L semakin lama mengalami kerugian yang besar diakibatkan pesatnya persaingan antara pengusaha meubel satu dengan yang lain mengakibatkan ia harus kembali ke negaranya dan mengakhiri kontrak perkawinannya dengan Ny. E. Berakhirnya perkawinan tersebut tidak menghasilkan seorang anak, serta tidak adanya pembagian harta warisan yang dilakukan.

3. Tujuan Perjanjian Perkawinan Kontrak

Tujuan dari adanya perjanjian perkawinan kontrak yang dilakukan kedua pasangan tersebut hanya sebatas mengambil keuntungan untuk masing-

masing pihak, perjanjian tersebut memuat jangka waktu perkawinan, hak dan kewajiban para pihak serta imbalan yang akan didapatkan.

Berdasarkan hal tersebut Tn. T memperoleh keuntungan dengan memperoleh seseorang yang dapat merawat dan menyiapkan kebutuhannya sehari-hari serta memenuhi kebutuhan biologisnya selama ia jauh dari istrinya. Sedangkan Ny. D memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang diberikan oleh Tn. T sebagai uang mahar, jatah bulanan, serta uang yang diberikan kepada Ny. D saat Tn. T kembali ke negara asalnya. Perjanjian dalam perkawinan kontrak tersebut dibuat oleh Tn. T dan Ny. D dengan diketahui oleh pihak ketiga yakni ayah Ny. D. Isi dari perjanjian/kontrak yang digunakan dalam perkawinan Tn. T dan Ny. D harus dikehendaki berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihaknya serta dijadikan sebagai suatu hal yang harus ditaati, apabila salah satu pihak mengingkarinya maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Hukum Perkawinan Campuran Hasil dari Perjanjian Kawin Kontrak

Pasal 1 UU Perkawinan telah menyebutkan bahwa perkawinan merupakan *“ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Pasal tersebut selanjutnya diikuti oleh Pasal 2 mengenai syarat sah perkawinan yang berbunyi :

(1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta kepercayaannya itu.*

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan untuk hidup dalam suatu keluarga. Pelaksanaan perkawinan yang diakui oleh hukum ialah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama yang bersangkutan dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Apabila kedua belah pihak memiliki perbedaan agama, maka sesuai kesepakatan para pihak dapat melakukan akad sesuai aturan islam kemudian pemberkatan di gereja.

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh Tn. T dengan Ny. D serta Tn L dengan Ny. D merupakan contoh perkawinan beda negara dan beda agama yang dilakukan di Indonesia. Dalam hal tersebut kedua belah pihak tidak melakukan perkawinan sah secara hukum melainkan memilih untuk melakukan perkawinan dengan kontrak mengenai jangka waktu dan dilakukan hanya dihadapan kyai secara islam. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan serta syarat sah perkawinan.

Pengertian perkawinan berdasarkan UU perkawinan memiliki makna bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, dimana ikatan dalam hal ini merupakan suatu kesepakatan dimana calon suami dan calon istri telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Ikatan dalam suatu perkawinan merupakan suatu hubungan hukum

antara kedua belah untuk memenuhi suatu prestasi dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama dalam melahirkan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Berdasarkan contoh kasus diatas para pihak dalam perjanjian kontrak tersebut telah memenuhi syarat subjektif berupa sepakat dan cakap. Para pihak sepakat untuk mengikat dirinya dalam sebuah perjanjian kontrak yang mengikat serta konsekuensinya. Syarat subjektif selanjutnya ialah cakap, kategori cakap menurut hukum perdata yakni seseorang yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah (Pasal 330 KUHPperdata). Berdasarkan hal pada saat perjanjian dibuat mereka telah termasuk usia cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum dimana Tn. T lahir pada tahun 1955 telah berusia 60 tahun sedangkan Ny. D lahir pada tahun 1980 telah berusia 35 tahun pada saat perkawinan dilakukan sedangkan Tn. L berusia 50 tahun dan Ny. E berusia 35 tahun pada saat perkawinan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan secara kontrak merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan perkawinan secara jelas telah menjadi bagian dari peraturan-perundangan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut mencerminkan bahwa perkawinan hendaknya hanya dilakukan satu kali seumur hidup dengan orang yang sama, dikarenakan perkawinan tidak hanya

mencakup hubungan antar manusia namun juga hubungan manusia dengan tuhan.

2. Akibat Hukum yang Timbul dari Perkawinan Kontrak ketika Perjanjian Perkawinan tersebut Berakhir

Akibat hukum yang diperoleh dalam suatu perkawinan ialah lahirnya hak dan kewajiban bagi suami, istri maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan campuran berdasarkan perjanjian kontrak sama halnya memperoleh akibat hukum seperti perkawinan pada umumnya, namun dalam perkawinan ini akibat hukum yang timbul menjadi lebih dikarenakan salah satu pihak merupakan seorang warga negara asing.

a. *Pasal 30, suami dan istri memikul kewajiban luhur dalam menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*

b. *Pasal 31*

(1) *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.*

(2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

(3) *Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.*

c. *Pasal 32*

- (1) *Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
 - (2) *Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.*
- d. *Pasal 33, suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.*
- e. *Pasal 34*
- (1) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
 - (2) *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.*
 - (3) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya hak dan kewajiban bagi suami maupun istri dalam suatu perkawinan merupakan hal yang berjalan berdampingan. Suami maupun istri berkewajiban untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain yang berkaitan dengan terciptanya keluarga yang bahagia dalam kehidupan masyarakat serta mewujudkan tujuan perkawinan dalam perundang-undangan. Pemenuhan hak dan kewajiban di antara keduanya merupakan perwujudan tanggung jawab bagi suami maupun istri atas

kesepakatan yang telah mereka buat dalam suatu perkawinan. Hal tersebut guna melindungi kepentingan hukum para pihak dalam suatu perkawinan.

Syarat formil dalam perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni

- a. *Pemberitahuan kepada Kantor Catatan Sipil secara lisan maupun tertulis selambat-lambatnya 10 hari sebelum perkawinan dilakukan. Perkawinan menurut agama islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama sedangkan selain itu dilakukan pada Kantor Catatan Sipil*
- b. *Penelitian oleh pegawai pencatat nikah guna mengetahui terpenuhinya persyaratan yang diajukan serta halangan untuk melakukan perkawinan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Apabila persyaratan tersebut belum terpenuhi maka akan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan*
- c. *Pengumuman mengenai hal tersebut dengan menempelkan surat pada papan pengumuman guna diketahui oleh para pihak apakah terdapat suatu hal yang bertentangan dengan agama yang bersangkutan maupun peraturan perundang-undangan*
- d. *Perkawinan dilaksanakan 10 (sepuluh) hari sejak diumumkan perkawinan dan dilakukan berdasarkan agama serta kepercayaan masing-masing pihak dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Selanjutnya para pihak yang bersangkutan menandatangani akta perkawinan.*

Pasal 58 UU Perkawinan menyebutkan bahwa :

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dapat menimbulkan akibat hukum berupa berubahnya status kewarganegaraan seseorang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan campuran yang dilakukan dengan perjanjian kontrak merupakan perkawinan yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan karena dilakukan berdasarkan perjanjian mengenai keuntungan serta jangka waktu berakhirnya perkawinan tersebut. Perkawinan kontrak tersebut tidak dianggap ada karena pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai perzinahan, sehingga apabila dalam perkawinan tersebut, lahir seorang anak maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sebagaimana Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Ketentuan mengenai kewarganegaraan bagi anak luar kawin yakni Pasal 5 ayat (1) UU Kewarganegaraan bahwa *Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh*

ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI.

SIMPULAN

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu perikatan yang dilakukan secara sakral oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Perkawinan dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila ia dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan campuran merupakan bentuk dari keberagaman budaya di Indonesia, namun hal tersebut banyak disalahgunakan oleh beberapa masyarakat dengan melakukan perkawinan yang bersdasar pada perjanjian kontrak untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu. Perkawinan campuran apabila dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan akan memiliki suatu akibat hukum yang sama dengan perkawinan sesama warga negara Indonesia. Namun, apabila perkawinan dilakukan dengan adanya perjanjian kontrak dimana hanya dilakukan secara agama tanpa adanya pihak yang berwenang, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak pernah ada dan terjadi serta tidak memiliki perlindungan hukum yang mengikat bagi para pihaknya. Akibat Hukum yang dapat timbul dikarenakan adanya perkawinan campuran tidak hanya meliputi hak dan kewajiban bagi para pihaknya, namun juga berkaitan dengan status kewarganegaraan, izin tinggal maupun perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

Undang-Undang No 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Undang-Undang No 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No 1 Tahun 1974
Perkawinan

Soeroso. R. 2011. *Pengantar Ilmu
Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Muggiati. 2012. Kedudukan Hukum
Kawin Kontrak Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan (Studi
Kasus di Cisarua-Jawa Barat).
Jurnal Constitution. 12 (1) : 49